



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 802/II/2014

II/FEBRUARI 2014



Komisi II Bertekad Tuntaskan RUU Pilkada Pada Masa Sidang Sekarang



KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA FEBRUARI 2014

Minggu kedua Februari 2014 ditampilkan dua tim yang telah dibentuk DPR dan telah mengalami perpanjangan masa tugas, yaitu tim Pemantau DPR-RI terhadap UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Tim Pengawas Perlindungan TKI di Luar Negeri, serta laporan kegiatan Ketua DPR-RI. Berikut ringkasan kegiatan DPR minggu kedua Februari 2014:

Laporan Tim Pemantau UU No. 11 Tahun 2006

Tim Pemantau UU No. 11 Tahun 2006 telah melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh pada tanggal 23 dan 24 Januari 2014. Tim memandang perlu melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh dengan tujuan menyerap aspirasi langsung dari Pemerintah Aceh. Fokus kunjungan yaitu pelaksanaan Otonomi Khusus di Aceh secara umum dan kemajuan program revitalisasi BUMN di Provinsi Aceh. Agenda kegiatan kunjungan Tim Pemantau ke Banda Aceh pada tanggal 23-24 Januari 2014, meliputi: *pertama*, pertemuan dengan Gubernur Aceh didampingi Pimpinan DPR Aceh beserta Kepala Dinas Pemerintahan Provinsi Aceh, Perwakilan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Kapolda, Pangdam, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Wakil Bupati Aceh Utara, dan Walikota Lhokseumawe. Kedua, pertemuan dengan jajaran direksi dari PT Arun NGL, Pupuk Indonesia, PLN, Pupuk Iskandar Muda, Petra Arun Gas, dan PT Kertas Kraft Aceh.

Dalam pertemuan pertama, Gubernur melaporkan telah banyak perubahan yang terjadi di Provinsi Aceh. Pemerintahan Provinsi Aceh telah berjalan dengan baik terutama aspek pelayanan publik yang telah menunjukkan kualitas yang meningkat. Sementara itu perdamaian Provinsi Aceh tetap terjaga dan hal ini memberikan iklim kondusif terhadap investasi di Aceh. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa implementasi UU tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA) belum sepenuhnya sempurna. Hal ini dikarenakan belum terbentuknya peraturan perundang-undangan yang

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



diamatkan UU-PA. Dalam rangka mempercepat pembangunan di Provinsi Aceh, saat ini Pemerintah Aceh tengah berusaha mencari investor hingga ke luar negeri. Gubernur menegaskan bahwa pembiayaan pembangunan dari investasi menjadi prioritas Pemerintah Aceh karena proses implementasinya lebih cepat daripada menggunakan dana dari APBD. Berkaitan dengan Qanun tentang Wali Nanggroe, terdapat perbedaan pendapat dengan Mendagri terkait kewenangan yang dimiliki oleh Wali Nanggroe. Pemerintah Aceh telah melakukan perubahan/revisi terhadap ketentuan dalam Qanun sesuai kesepakatan dengan Mendagri, dan saat ini Pemerintah Aceh masih menunggu putusan Mendagri berkaitan dengan revisi tersebut.

Pemaparan Ketua tim Pemantau berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang belum terbit; terminal gas terapung yang hendak dibangun di Pelabuhan Belawan; revitalisasi pelabuhan di Provinsi Aceh, tim berkomitmen untuk mengawal kemajuan pembangunan pelabuhan Kualalangsa menjadi pelabuhan ekspor; komitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh. Kesimpulan dari hasil kunjungan kerja;

Pertama, Tim Pemantau memandang perlu untuk memanggil Menko Perekonomian beserta kementerian teknis di bawahnya untuk membahas masalah pembangunan di Provinsi Aceh. Fokus utama dari pertemuan ini adalah meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai perkembangan pembahasan RPP Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Aceh. Sebagai informasi, Kementerian



ESDM sudah menyepakati substansi dari RPP, tetapi RPP tersebut masih menemui kendala di Kementerian Keuangan berkaitan dengan batas mil laut pengelolaan migas oleh Pemerintah Aceh.

Kedua, Tim Pemantau akan mendorong Pemerintah untuk segera menyelesaikan Perpres mengenai Penyerahan Kantor BPN menjadi perangkat daerah Aceh. Tim Pemantau berpesan bila nantinya aset BPN sudah dialihkan, hendaknya Pemerintah Aceh dapat menggunakannya semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah pertanahan yang mungkin masih terjadi pasca tsunami.

Ketiga, Tim Pemantau mengharapkan pembahasan revisi Qanun tentang Bendera dan Qanun tentang Wali Nanggroe oleh Pemerintah Aceh dan Kemendagri dapat berjalan lancar. Tim Pemantau juga mengharapkan agar keberadaan Wali Nanggroe hendaknya dapat menjaga dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga adat dan adat istiadat di Provinsi Aceh.

Keempat, berkaitan dengan harga gas yang berada di atas angka 10 dolar AS per MMBTU, Tim Pemantau memandang harga ini sudah tidak berpihak lagi kepada usaha revitalisasi BUMN di Aceh. Tim Pemantau memandang perlu memanggil Pemerintah beserta BP Tangguh sebagai pemilik gas dan meminta keterangan mengenai tingginya harga gas. Tim Pemantau juga mendorong Pemerintah agar menegosiasikan ulang harga gas dari BP Tangguh.

Kelima, Tim Pemantau mengharapkan Pemerintah Aceh dapat bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam menjaga perdamaian di Aceh terutama menjelang Pemilu. Tim Pemantau juga mendorong pihak kepolisian untuk menyelesaikan masalah senjata yang mungkin masih beredar di masyarakat.

Kegiatan Tim Pengawas DPR RI terhadap perlindungan TKI

Rapat dengar pendapat Tim Pengawas DPR-RI pada tanggal 30 Januari 2014 terhadap perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI DPR-RI)

dengan Ditjen Bina Penta, Kemena-kertrans R.I; Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri R.I; Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2 TKI); Bareskrim, Kepolisian RI; Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI. Dengan agenda: Kebijakan dan upaya Kementerian/Lembaga dalam Pencegahan dan PenangananTKI Ilegal di dalam Negeri dan di Luar Negeri, serta koordinasinya; Persiapan Kementerian/Lembaga dalam menghadapi “Roadmap 2017” menuju zero penempatan TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) serta koordinasinya.

Kesimpulan rapat: (1) Sepakat bahwa permasalahan pokok TKI berada di dalam negeri (Indonesia), mulai dari perekrutan hingga pengiriman, serta terkait erat permasalahan sosial ekonomi masyarakat Indonesia; (2) Masing-masing kementerian/lembaga telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sesuai yang diatur dalam ketentuan, dan tidak bisa saling menyalahkan. Dalam permasalahan TKI, sangat nampak kementerian/lembaga masih cenderung berjalan sendiri-sendiri dan lemahnya koordinasi lintas kementerian/lembaga. (3) Timwas bermaksud mengumpulkan semua masukan kementerian/lembaga terkait, yang berjumlah 24 K/L dan akan memetakan persoalan serta akan memberikan rekomendasi secara komprehensif (menyeluruh).

Rapat dengar pendapat tim pengawas DPR RI tanggal 3 Februari 2014 terhadap perlindungan tenaga kerja Indonesia (Timwas TKIDPR RI) dengan: Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Kemensos R.I); Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan R.I (BNPP); Dirjen Perhubungan Laut (Kemenhub R.I); Dirjen Perhubungan Udara (Kemenhub R.I); Dirut P.T. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dengan agenda rapat: (1) Kebijakan dan upaya Kementerian/Lembaga dalam Pencegahan dan PenangananTKI Ilegal di dalam Negeri dan di Luar Negeri, serta koordinasinya; (2) Persiapan Kementerian/Lembaga dalam menghadapi “Roadmap 2017” menuju zero penempatan TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) serta koordinasinya.

Kesimpulan rapat setelah forum rapat mendengarkan presentasi dari masing masing pejabat tersebut dengan tugas pokoknya masing masing dalam kaitannya dengan masalah TKI termasuk kerjasama dalam menangani TKI bermasalah (*overstayers*) maka akhirnya rapat sepakat (1) bahwa masalah TKI akar permasalahannya ada didalam negeri yang harus diselesaikan lintas / antar kementerian / lembaga secara terpadu. (2) Timwas akan mengundang kembali seluruh Kementerian / Lembaga / Stakeholder setelah Timwas TKI merampungkan peta permasalahan secara menyeluruh.

Kegiatan Ketua DPR-RI

Sosialisasi RUU tentang Desa dalam forum Rapat Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Sumedang, 30 Januari 2014. Hadir pada acara tersebut, Bupati Sumedang beserta perangkat, Ketua DPRD dan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendagri. Hadir pula 824 Kepala Desa dan perangkat nya serta 26 Camat. Pada sesi pemaparan UU Desa, Ketua DPR RI mengatakan bahwa UU ini adalah inisiatif Pemerintah yang disampaikan pada bulan Februari 2012 dan kemudian pembahasan dilakukan oleh Panitia Khusus. UU ini adalah pecahan dari UU Pemerintah Daerah yang dibagi menjadi tiga RUU, yaitu RUU Pemerintahan Daerah, RUU Pemilukada dan RUU Desa. Pembahasan mengalami kebuntuan terkait dengan materi-materi strategis, sehingga mengalami tujuh kali masa sidang. Namun, UU ini menjadi UU yang benar-benar fenomenal yang dihasilkan oleh DPR dan Pemerintah, seperti RUU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang juga mengalami kendala ketika pembahasan.

Ketua DPR RI menyatakan bahwa Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan program-program yang terencana, didukung oleh rakyat. Desa yang makin cerdas yang akan menghasilkan rakyat yang sejahtera. RUU tentang Desa membawa paradigma baru dalam pembangunan, karena Desa akan mengubah cara pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi, tidak selamanya berada di kota/

perkotaan. Membangun Indonesia haruslah di mulai dari Desa, karena Desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat. Hal yang perlu dan penting untuk diketahui masyarakat adalah mengenai hak dan wewenang Pemerintahan Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkatnya. Juga mengenai masa jabatan dan penghasilan yang didapat dari sumber dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Diatur juga dalam UU ini tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan, di mana anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah. Sedangkan untuk pengawasan, diatur pada pasal 112 yang intinya adalah, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan

mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pengawasan ini dapat didelegasikan pada perangkat daerah.

Pertemuan Ketua DPR RI dengan Dubes Republik Tunisia

Pada tanggal 3 Februari 2014, Ketua DPR RI menerima Dubes Republik Tunisia untuk Indonesia, H.E.Mr.Mourad Belhassen. Duta besar Republik Tunisia untuk Indonesia ini menyampaikan undangan tertulis dari Presiden Majelis Konstituante Nasional Republik Tunisia H.E. Mustapha Ben Jafar. Surat tersebut berisi undangan pada Ketua DPR RI, Dr.H.Marzuki Alie untuk menghadiri acara peresmian adopsi konstitusi negara baru bagi bangsa dan negara Tunisia, yang akan diadakan pada tanggal 7 Februari 2014. Ketua DPR RI menyampaikan selamat atas keberhasilan disepakatinya konstitusi baru negara Tunisia oleh berbagai elemen rakyat Tunisia, serta juga merupakan pilihan asasi rakyat Tunisia yang sangat

menghendaki demokratisasi di Tunisia. Konstitusi baru ini akan menjadi fondasi kokoh bagi kemajuan Tunisia yang modern, demokratis, berkemakmuran dan sesuai dengan harapan rakyat Tunisia.

Dalam kesempatan kunjungan kerja Ketua DPR RI ke Republik Tunisia sebagai Presiden PUIK Konferensi ke-7 pada tanggal 29 November 2012-2 Desember 2012, Ketua DPR RI bersama Ketua Majelis Konstituante Nasional Republik Tunisia, H.E Mustapha Ben Jafar banyak membahas berbagai hal terkait isu demokratisasi di kedua negara. Pada kesempatan itu juga, Ketua DPR RI menyampaikan rasa optimisnya bahwa Tunisia akan dapat melalui gelombang besar demokratisasi yang melanda banyak negara di dunia dengan sukses. Hal ini tidak disebabkan oleh pengalaman perjuangan Tunisia yang sangat matang dalam membangun bangsanya. Sehingga, kesepakatan antar berbagai elemen bangsa terhadap sebuah konstitusi baru bagi Tunisia dapat tercapai.**

Komisi II Bertekad Tuntaskan RUU Pilkada Pada Masa Sidang Sekarang



Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa didampingi Dirjen Otda dan Pengamat LIPI Siti Zuhro dalam Forum legislasi di Press Room DPR.

Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) akan diselesaikan pada masa sidang sekarang. "Apapun kondisinya RUU ini harus diselesaikan, walaupun tidak disepakati pada Tingkat I, akan tetap dibawa ke Tingkat Rapat Paripurna," ujar Ketua Komisi II DPR Agun

Gunandjar Sudarsa dalam Forum legislasi di Press Room DPR, Selasa (4/2).

Dalam acara yang bertema perkembangan pembahasan RUU Pilkada ini hadir pula Dirjen Otonomi Daerah Johermansyah dan pengamat politik dari Lipi Siti Zuhro.

Selanjutnya Pimpinan Komisi II ini berharap, tidak ada substansi yang harus berujung di Rapat Paripurna nanti dengan pengambilan keputusan melalui voting (pemungutan suara) dan tidak menyisakan satupun masalah yang belum disepakati. "Itulah tekad kuat dan semangat di Komisi II," katanya.

Sejak awal, kata Agun, Komisi II sudah sepakat perlunya Pilkada serentak, semua setuju dilakukan pada 2015 dan 2018. Artinya lima tahun ke depan pasca pemilu 2014, hanya ada dua kali pemilukada yang diserahkan yaitu tahun 2015 dan 2018. Mana yang akan dikelompokkan, melihat akhir dari jabatan masing-masing kepala daerah.

Yang belum dicapai kesepakatan, menurut politisi Golkar ini, apa yang dimaksud pemilukada serentak, apakah pileg dan pemilu eksekutif, atau pemilu lokal atau pemilu nasional. Ini masih menjadi perdebatan karena masing-masing fraksi mempunyai argumentasi yang kuat. Karena itu, sudah ada kesepakatan yang mengerucut, melihat keputusan MK terakhir bahwa pemilu legislative dan pemilu presiden akan serentak pada pemilu 2019.

“Yang diserahkan itu sesuai perintah konstitusi yaitu pemilu lima kotak sesuai bunyi pasal 22 E UUD 45 bahwa pemilu 5 tahun sekali itu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD,” tegasnya.

Merujuk kepada keputusan MK yang bersifat final dan mengikat itu, maka Komisil sudah mengerucut pada gagasan pemikiran bahwa yang dimaksud pemilu serentak tahun 2015 dan 2018 itu adalah pemilihan kepala daerah. Karena itu tidak ada lagi perdebatan pemilu nasional dan pemilu lokal.

Untuk selanjutnya, jelas Agun, untuk pemilukada berikutnya hanya lima tahun sekali yaitu tahun 2020. “Jadi nanti 2019 hanya ada pemilu dan 2020 pemilukada, itu siklus yang dikondisikan, namun belum diketuk palu, masih diberi kesempatan kepada fraksi-fraksi berkoordinasi dengan DPP dan Kemendagri dengan Presiden,” katanya.

Pengamat Lipi Siti Zuhro mencatat, dalam pembahasan RUU ini terlihat kebingungan baik DPR maupun Pemerintah. Kebingungan pemilu seperti apa yang akan diterapkan di Indonesia karena obsesinya semula dengan pelaksanaan pilkada langsung ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. “Artinya kita sedang melakukan pencarian sistem pemilu apa yang tepat dilaksanakan di Indonesia. Saya

lebih condong harus membedakan tidak lima kotak,” katanya.

Menurut Zuhro, biarlah pemilu nasional miliknya pilpres dan pileg yang dilakukan simultan minus DPRD, dan pemilu lokal biarlah miliknya pilkada dengan DPRD. Jangan lupa, Pilkada itu harus konek dengan Otonomi daerah.

“Kita coba memahami praktek otonomi, lokal konten ini banyak nggak jelasnya. Banyak isu-isu daerah yang tidak dikedepankan, justru isu nasional lebih menonjol. Ini yang harus dikedepankan karena tidak mungkin menggelar pilkada caranya terpusat. Akhirnya tidak terlihat lagi kebanggaan-kebanggaan daerah,” katanya.

Akhirnya Zuhro menambahkan, kita menata ulang pemilu karena apa yang dilaksanakan selama ini ternyata sudah salah. “Kita tidak konsisten dengan system presidensial kita, bukan serentaknya. Tetapi meletakkan system presidensial yang tidak tepat. Hanya di konstitusi, dalam prakteknya tidak,” pungkas Zuhro. (mp)/foto:iwan armanias/parle/odjie*

Penanganan Sawah Puso Harus Terpadu

Menyusul bencana banjir di sejumlah daerah yang mengakibatkan areal pertanian puso (rusak) dan gagal panen, maka pemerintah dihimbau memberi solusi terpadu atas kerugian yang diderita para petani di daerah. Setidaknya, ada 16 provinsi di Indonesia yang mengalami kerusakan areal sawahnya akibat bencana banjir ini.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto (F-PKS), Rabu (6/2). Dalam rilis yang disampaiannya, dia mengingatkan pemerintah agar penanganan sawah puso yang terkena bencana banjir di 16 provinsi dilakukan secara terpadu. Wilayah terluas yang terkena banjir adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Aceh.

Menurut Hermanto, koordinasi menjadi kunci keberhasilan dalam memulihkan kondisi area tanaman pangan. Permasalahan ini tidak mungkin hanya ditangani oleh satu kementerian, na-



Anggota Komisi IV DPR Hermanto.

mun harus lintas sektoral.

“Bencana banjir yang tengah terjadi saat ini jelas akan menambah beban petani. Bahkan secara nasional dampak banjir ini telah menyebabkan kerugian khususnya bagi petani yang mencapai Rp 2,54 triliun. Kerugian terbesar adalah akibat rusaknya tanaman padi

di lahan sawah dan diiringi dengan rusaknya jaringan irigasi di tingkat usaha tani,” jelas Hermanto.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera Dapil Sumatera Barat ini berharap, pemerintah secara lintas sektoral melakukan aksi nyata, baik jangka pendek pada masa tanggap darurat maupun tahap pemulihan. Hal ini penting agar produksi pangan nasional khususnya padi tidak terganggu, sehingga mampu memberikan jaminan terhadap ketersediaan pangan, imbuhnya.

Sebagai gambaran, Kementerian Pertanian mengungkapkan, selama Oktober 2013 - Januari 2014 sektor pertanian mengalami kerugian hingga mencapai Rp 2,54 triliun akibat bencana. Kerugian terbesar akibat rusaknya tanaman padi di lahan sawah dan rusaknya jaringan irigasi di tingkat usaha tani. (mh)

Otsus Papua Masih Menyisakan Banyak Masalah



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso didampingi Anggota Komisi I Yorrys Raweyai menerima Gubernur Papua.

Otonomi Khusus (Otsus) Papua masih menyisakan banyak masalah. Dari penyalahgunaan dana otsus hingga konflik bersenjata masih menjadi masalah serius di tengah semangat membangun Papua. Ditambah lagi persoalan kontrak karya *Freeport* dan *British Petroleum* yang beroperasi di Papua belum membawa kesejahteraan bagi rakyat Papua.

Demikian mengemuka dalam pertemuan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, Kamis (5/2). Bertempat di ruang kerja Priyo, Gubernur Papua berbincang banyak hal soal kondisi Papua terkini. Dana Otsus, kata Lukas, banyak menguap sebelum dirinya menjadi gubernur. Tidak jelas ke mana dana itu diselewengkan. Akhirnya, pembangunan pun tersendat.

Seperti diketahui, dana Otsus Papua sekitar Rp 35 triliun. Dana yang diselewengkan juga cukup besar. Untuk itulah, dihadapan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Gubernur Papua menyatakan akan segera melaporkan hal ini ke BPK untuk minta audit secara tuntas atas dana Otsus tersebut. Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Yorrys Raweyai yang

ikut mendampingi Priyo, menyatakan, DPR sebetulnya sudah melaporkan penyalahgunaan anggaran Otsus itu ke pemerintah. Hanya saja hingga kini belum jelas hasil penyelidikannya.

Selain penyalahgunaan dana Otsus, Gubernur Papua juga melaporkan banyaknya kontak senjata di daerah-daerah pedalaman Papua. Ini sangat mengganggu stabilitas Papua yang ingin membangun. Gubernur Papua mengungkapkan, tak habis pikir, bagaimana kelompok sipil bersenjata itu mendapatkan amunisi. Selama kontak senjata dengan aparat keamanan dan warga setempat, amunisi tersebut tak pernah habis. Kecurigaan pun muncul. Mungkin ada oknum pejabat daerah atau aparat keamanan yang menjual amunisi ke kelompok bersenjata tersebut.

Amunisi-amunisi yang ditemukan di lokasi konflik, ternyata buatan Pindad. Ini juga menjadi laporan penting yang disampaikan kepada Priyo. Di tengah medan yang sulit, bahkan tak ada akses jalan ke pedalaman, amunisi itu banyak sekali ditemukan. Ini perlu penyelidikan lebih lanjut. Bahkan, Yorrys sempat berkelakar, mungkin ada oknum aparat yang pergi ke Papua “membawa M 16 dan pulang membawa 16 M”. Pelesetan ini menyiratkan ada oknum di Papua yang menjual senjata dan amunisi ke kelompok bersenjata.

Sementara itu, soal kontrak karya *Freeport* dan *British Petroleum*, dua perusahaan tambang yang beroperasi di Papua, akan lebih serius ditinjau ulang. Karena selama ini keduanya tak cukup membawa kesejahteraan bagi rakyat Papua. Konflik sosial juga kerap muncul dari ketidakpedulian dua perusahaan tambang tersebut pada masyarakat Papua. Sumber daya alam Papua yang melimpah akhirnya tak membuat rakyat Papua sejahtera. Sebaliknya, kekayaan tambang tersebut justru diangkut ke luar negeri. (mh) Foto: Rizka/Parle.

Rencana Pemberian Voucher Belanja Jamaah Haji Diminta Dibatalkan

Komisi VIII DPR RI meminta rencana pemberian voucher potongan harga bagi calon jamaah haji saat di tanah suci ditiadakan. Karena voucher tersebut malah akan mendidik para calon jamaah haji untuk bertindak konsumtif di tanah suci. Hingga akhirnya malah mengaburkan niat ibadah mereka. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VIII, Hasrul Azwar saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa Direktur Perbankan Indonesia, Rabu (6/2).



Anggota Komisi VIII DPR Hasrul Azwar.

“Voucher belanja Mandiri kalau menurut saya itu malah akan membuat nafsu belanja para jamaah semakin menggebu-gebu. Akibatnya, selain akan mengaburkan niat dari ibadah haji itu sendiri, juga akan membuat barang bawaan mereka menjadi over loading saat akan kembali ke tanah air. Padahal sebenarnya barang apapun di tanah suci, di Indonesia juga tersedia,” ujar Hasrul.

Ditambahkannya, akan lebih baik jika



voucher belanja itu diganti dalam bentuk hal yang lain, yang lebih membawa manfaat. Apalagi Menteri Agama beberapa waktu yang lalu berencana untuk menghapus sistem transit atau menginap di Jeddah untuk transit dari Mekkah menuju Bandara King Abdul Aziz, konon dalam masa transit itulah yang digunakan para jemaah haji untuk membeli berbagai macam barang di tanah suci.

Menanggapi hal itu tersebut, Wakil Dirut Mandiri, Abdul Rachman mengatakan bahwa sebenarnya gagasan rencana pembuatan voucher tersebut berasal dari Kementerian Agama sendiri, untuk membuat sesuatu yang lain dari biasanya sebagai salah satu bentuk *service* atau pelayanan kepada calon jemaah haji. Namun jika kemudian hal tersebut akan berdampak kurang baik bagi jemaah haji seperti yang diungkapkan anggota Komisi VIII,

maka ia bersama Kementerian Agama akan mengkaji ulang rencana tersebut.

“Awalnya ide tersebut dari Kementerian Agama sendiri yang meminta sesuatu yang lain untuk jemaah haji. Namun jika memang membawa dampak negatif tentu kami sependapat dengan Komisi VIII untuk meninjau ulang rencana tersebut,” jelas Abdul Rachman. (Ayu) Foto: Iwan Armanias/Parle.

Merpati Harus Di Cut-Off

Maskapai penerbangan plat merah Merpati tidak dikelola dengan sungguh-sungguh. Sebagai penerbangan perintis, mestinya Merpati banyak menghasilkan keuntungan. Menjadi tanda tanya besar ketika Merpati mendapat *privilege* dari negara, justru malah merugi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo di ruang kerjanya, Rabu (5/2). Untuk itu, Pramono menyarankan agar Merpati di-cut off saja. Utang Merpati saja sudah mencapai Rp 6 triliun. Utang itu merupakan peninggalan masa lalu sejak zaman Orde Baru (Orba) yang hingga kini belum diselesaikan.

“Kalau utang itu karena kesalahan manajemen, ya manajemennya yang harus bertanggung jawab. Bisa berlaku mundur. Tapi kalau itu beban yang harus ditanggung secara akumulatif, maka harus di-cut off. Engga bisa menjadi beban terus menerus,” tegas Pramono. Beban bunganya terus menumpuk. Harus ada pemutihan dan diberikan kesempatan kepada direk-



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung.

sinya untuk memperbaiki diri.

“Saya melihat pengelolaan Merpati tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam arti pendekatan bisnis. Memang, merpati kita bebani sebagai jalur penerbangan perintis. Pertanyaannya, kenapa kemudian perusahaan perintis yang swasta untung, sementara Merpati yang notabene ditopang oleh negara malah rugi. Padahal mereka juga diberi *privilege* untuk itu. Berarti ada pengelolaan yang salah

dalam hal ini,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini.

Sebenarnya, lanjut Pramono, ekonomi kita sedang tumbuh. Dan masyarakat Indonesia terbiasa memobilisasi kegiatannya dengan menggunakan pesawat. Itu peluang bisnis besar bagi Merpati. Bahkan, perusahaan penerbangan kecil lainnya yang beroperasi di bagian timur Indonesia, malah terus menambah armada pesawatnya. “Kita yang diberikan *privilege* malah tutup. Pasti ada sesuatu yang harus diperbaiki.”

Bagaimana pun negara tetap harus memiliki penerbangan perintis. Peran penerbangan perintis sangat strategis untuk pemerataan pembangunan. Dan Merpati sejak pertama kali beroperasi, memang sudah diproyeksikan untuk penerbangan perintis. “Kita tahu Indonesia lebih dari 17 ribu pulau. Kalau tidak ada penerbangan perintis yang dimiliki oleh negara, maka tidak baik bagi pemerataan pembangunan di Republik ini,” tutur Pramono. (mh)/foto:iwan armanias/parle.

Perhatian Dunia Terhadap Pemilu Indonesia Hal Positif

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyatakan, tidak hanya dari Kedutaan Kanada, tetapi semua Kedubes asing di Jakarta melihat Indonesia yang sebentar lagi akan menggelar Pemilu legislatif dan pemilu Presiden. Mereka memberikan perhatian secara khusus, karena bagaimanapun Indonesia sebagai negara besar, demokrasinya sudah mengalami pendewasaan, apalagi sering dikatakan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dan negara muslim terbesar di dunia.

Hal itu dikemukakan Pramono Anung ketika menerima Sekretaris Politik Kedubes Kanada Dana Smith di ruang kerjanya Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

Menurut Pramono, kalau kemudian dunia memberikan perhatian secara khusus terhadap pemilu tahun 2014 ini, tentunya menjadi hal yang positif bagi Indonesia. Yang paling penting dari pengalaman pemilu 1999, 2004 dan 2009,



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menerima Sekretaris Politik Kedubes Kanada. dulu banyak pengamat dan tidak percaya demokrasi kita betul-betul jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.

Namun sekarang ini menurut Pramono mengutip pernyataan Dana Smith, bahwa Indonesia sudah diakui betul-betul sebagai negara demokrasi. Dengan demikian mereka

percaya pemilu 2014 di Indonesia akan berjalan dengan baik tidak ada hal luar biasa. Kepada Pimpinan Dewan, Smith juga mempertanyakan, kenapa ketika terjadi sengketa parpol, tidak seperti dulu dengan mengerahkan masa dengan memberikan tekanan kepada MK, namun sekarang tidak terjadi.

“Kita belajar dari pengalaman lalu Partai Bulan Bintang (PBB) dan PKPI ketika sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilu, mereka melakukan pra peradilan dan akhirnya memenangkan. Inilah yang menjadi kekuatan dan kedewasaan kita, sehingga tidak lagi mengerahkan masa,” jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Menanggapi masalah dana saksi yang memunculkan polemik, sebagai kader PDI Perjuangan dia menegaskan, Pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana saksi sebab bisa menimbulkan kecurigaan. Apalagi di masa banyak bencana seperti ini, dana saksi lebih baik dibiayai oleh parpol. Hal itu juga merupakan proses bagi partai untuk bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. (mp)/foto:iwan armanias/parle.

Baleg DPR Ingin Posisi Polisi Secara Profesional Kuat

Anggota Badan Legislasi DPR RI, Buchori menyatakan *political will* Dewan merevisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah untuk memperkuat *positioning* polisi secara profesionalis, namun bukan dari segi kelembagaannya.

Hal tersebut disampaikan Buchori saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum Baleg dengan Anggota Kopolnas Adrianus Meliala dan M. Nasser terkait masukan revisi UU Nomor 2 Tahun 2002, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/2)

Menurut Buchori, gencarnya pembicaraan *positioning* lembaga kepolisian menjadi salah satu alasan direvisinya UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

“Posisi lembaga ini mulai banyak yang mempertanyakan, meskipun lebih banyak yang mendukung bahwa posisi polisi dibawah langsung Presiden tetap menjadi posisi yang ideal,” kata Buchori.

“Hiruk pikuk di Kepolisian terutama *complain* dari masyarakat terkait de-

ngan mentalitas dan juga kualitas polisi ini juga merupakan sisi-sisi yang banyak dipertanyakan oleh publik,” ujar politisi PKS ini.

Oleh karena itu, kata Buchori, *political will* Dewan adalah ingin memiliki lembaga kepolisian yang kita cintai ini dikembalikan kepada marwahnya.

Dijelaskan Buchori, saat pembahasan UU KPK di Komisi III pada Konsideran Menimbang, secara pribadi dirinya sebenarnya prihatin. Pasalnya, salah satunya lembaga polisi didalam Konsiderans Menimbang UU tersebut termasuk lembaga yang *didown grade*, sehingga menjadi alasan lahirnya lembaga KPK.

Padahal lembaga kepolisian itu, menurut Anggota Komisi III DPR RI ini, memiliki struktur mulai dari pusat sampai desa. Diinformasikan Buchori, saat ini polisi sedang menambah 50 ribu personil, dimana nantinya satu desa satu polisi, dan ini sudah mulai dicanangkan.

“Tapi lembaga ini *terdown grade* sendiri oleh UU. Untuk mengentas-



Anggota Baleg DPR Buchori.

kan itu maka kita membutuhkan satu konsideran alasan yang lebih kuat,” tegasnya.

“Oleh karena itu *political will* dari rancangan UU ini adalah bagaimana kita ingin memperkuat *positioning* polisi agar bukan dalam konteks kelembagaannya yang kuat, tapi bagaimana tingkat profesional polisi ini yang kemudian lebih penting,” paparnya.

Selain itu, tambah Buchori, posisi Kopolnas juga menjadi bagian dari



revisi UU ini. Jika dalam TAP MPR jelas Kopolnas adalah lembaga independen, lembaga yang tidak merupakan bagian daripada struktur dari Kepolisian tetapi independen di luar. Namun berbeda dalam prakteknya sampai sekarang.

Dijelaskan Buchori, oleh sebab itulah Baleg mengundang Kopolnas hari ini untuk mendapatkan masukan aspek-aspek mana yang terkait UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian ini bisa direvisi lebih baik.

“Karena beliau lebih tahu. Bagaimana posisi Kopolnas ini. Apa usulan yang diinginkan oleh Kopolnas,” jelas Buchori. (sc)/foto:iwan armanias/parle/odjie*

BK Minta Keterangan Komisioner KPI

Badan Kehormatan (BK) DPR RI meminta keterangan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Agatha Lily terkait dugaan pelecehan yang dilaporkan Komnas Perempuan terhadap dirinya dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I. Usai pemeriksaan Komisioner KPI terpilih ini membantah telah terjadi pelecehan.

“Yang saya sampaikan tadi sesuai apa yang terjadi, sesuai kenyataan, tidak ada pelecehan,” katanya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/14). Ia juga menyampaikan kesediaan untuk dikonfirmasi dengan Komnas Perempuan yang telah menyampaikan pengaduan kepada BK.

Ketua Badan Kehormatan Trimedya Panjaitan menyatakan langkah selanjutnya untuk mengungkap pengaduan ini adalah dengan mempertemukan pihak-pihak yang terkait yaitu anggota



Ketua BK DPR Trimedya Panjaitan.

Komisi I yang dilaporkan, Komnas Perempuan dan Agatha Lily. “Kita akan panggil Komisi I yang disebut-sebut Komnas Perempuan melakukan pelecehan terhadap Bu Agatha. Tentunya Komnas Perempuan juga akan kita pertemukan, tapi karena yang ramai adalah Bu Agatha jadi Beliau duluan

yang dipanggil. Bu Agatha juga bersedia kalau dipertemukan semuanya,” paparnya.

Politisi PDIP ini juga menyebut dari keterangan yang diperoleh dari Agatha Lily, apa yang disebut Komnas Perempuan sebagai pelecehan itu adalah upaya untuk mencairkan suasana agar *fit and proper test* tidak terlalu tegang. “Menurut Ibu Agatha kalau ada hal-hal yang melanggar kehormatan, Beliau pasti dia duluan yang akan protes,” turut Trimed.

Dalam pengaduan yang diperoleh wartawan ada sejumlah pertanyaan anggota Komisi I dalam proses *fit and proper test* calon anggota KPI yang menurut Komnas Perempuan masuk kategori pelecehan diantaranya; Ibu kok halus sekali, lemah gemulai, apa nanti bisa tegas? Sudah punya pacar belum? Ibu kok cantik, ke Spa berapa kali?. (iky) foto:iwan armanias/parle.

Komisi III Tolak Setujui Tiga Calon Hakim Agung

Rapat pleno Komisi III DPR RI memutuskan menolak menyetujui 3 calon hakim agung yang telah dikirimkan Komisi Yudisial. Keputusan diambil setelah melewati proses pemungutan suara yang diikuti oleh 48 orang anggota komisi hukum ini.

“Berdasarkan hasil yang telah saya sampaikan karena jumlah suara tidak memenuhi ketentuan 50 persen plus 1 seperti yang telah kita sepakati maka ketiga calon hakim agung itu kita tolak, tidak mendapatkan persetujuan. Setuju?” tanya pimpinan sidang Pieter C. Zulkifli, Ketua Komisi III, dalam rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/14).

Mayoritas anggota Komisi III menyatakan penolakan seperti terlihat dari perolehan suara, calon hakim agung Suhardjono SH, MH memperoleh suara Setuju 3, Tidak Menyetujui 44, Abstain 1. Calon hakim agung Maria Anna



Suasana Rapat Pleno Komisi III DPR.

Samiyati SH, MH; Setuju 3, Tidak Menyetujui 44, Abstain 1, sedangkan DR. H. Sunarto SH, MH, Setuju 5, Tidak Menyetujui 42 dan Abstain 1.

Menjawab pertanyaan wartawan Pieter menekankan penolakan Komisi III ini bukan merupakan bentuk perlawanan terhadap hasil *judicial review* MK yang memangkas kewenangan DPR. “Anda bisa lihat sendiri disitu hasilnya. Bagaimana pertanyaan anggota dan jawaban calon pada saat *fit and proper test* jadi jangan ditafsirkan yang lain,” ujarnya.

Pada bagian lain Politisi FPD ini menambahkan langkah Komisi III selanjutnya adalah melakukan rapat internal untuk menyikapi hasil *fit and proper test* yang disebutkan mengecewakan. “Dalam waktu dekat kita akan rapat internal pimpinan dan anggota. Kita akan bicara dengan KY untuk mengetahui terminologi apa yang dipakai KY sehingga 3 calon ini yang dikirim ke Komisi III,” demikian Pieter. *(iky)/foto:iwan armanias/parle/andri**

Komisi X Desak Kemendikbud Persiapkan UN 2014 Sebaik Mungkin



Tim Komisi X DPR menggelar pertemuan dengan Kadis Dikbud Sulawesi Selatan.

Ujian Nasional (UN) 2014 untuk SMA, SMK, dan MA akan dilaksanakan pada bulan April 2014. Oleh karenanya, Komisi X DPR mendesak Kemendikbud untuk mempersiapkan UN 2014 sebaik mungkin agar kualitas UN 2014 meningkat dari 2013. Baik dari sisi materi soal, pelaksanaan, pengawasan, dan keluaran atau *output*.

“Apabila UN 2014 bermasalah, maka Komisi X tidak akan menyediakan atau menyetujui anggaran UN 2015. Komisi X mendukung anggaran UN 2014 agar tidak terjadi insiden seperti UN 2013 lalu,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Syamsul Bachri (F-PG) saat pertemuan Tim Komisi X dengan Kadis Dikbud beserta jajaran Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), pekan lalu.

Dia menambahkan, pihaknya sudah wanti-wanti kepada Mendikbud. “Kami tidak ingin mereka bilang siap tetapi di lapangan tidak. Kita tidak berhenti dari situ, kita akan mengecek terus bagaimana kedepannya. Tentu kita akan bertanya ke siswa-siswa, apakah mereka sudah siap dalam materi maupun mental mereka bagaimana,” jelasnya.

Oleh karenanya, lanjut Syamsul, kunjungan ini adalah dalam rangka pengawasan, apakah pemerintah siap untuk menyelenggarakan UN 2014. Masukan yang disampaikan kepada Komisi X, mereka minta kepercayaan percepatan dan segalanya dipercayakan oleh daerah, dan tidak disentralisasi.

Dalam kaitan ini, kata politisi Partai Golkar, DPR tidak dalam posisi lebih teknis lagi, tetapi diserahkan kepada dis-kresi pemerintah. “Yang terpenting adalah, jangan sampai terjadi kesulitan dalam distribusi soal dan tidak ada keborosan soal,” tambahnya.

Kunjungan spesifik Komisi X DPR RI terdiri atas 8 orang dipimpin Syamsul Bachri dari sejumlah anggota lintas fraksi yakni Sri Novida dari F-PD; Oelfah A Syahrullah Harmanto dari F-PG; TB. Dedi Suwandi Gumelar dari F-PDI Perjuangan; Ahmad Zainuddin dari F-PPKS; Dedi Wahidi dari F-PPKB; Nuroji dari F-Partai Gerindra; dan Muchtar Amma dari F-Partai Hanura. *(iw)/foto:iwan armanias/parle.*

Petani Butuh Asuransi Pertanian Saat Terdampak Bencana

Dampak gagal panen di beberapa tempat akibat bencana di Indonesia akan berdampak pada ketahanan pangan nasional. Akibat kondisi gagal panen selain berdampak pada hasil produksi pangan nasional.

Anggota Komisi IV DPR RI Anton Sukartono Suratto (F-PD) mengatakan kesejahteraan petani sehari-hari saat gagal panen juga harus diperhatikan, karena petani tidak mendapatkan penghasilan

dengan kondisi gagal panen.

Hal itu dikemukakannya Senin (3/2) saat Komisi IV DPR RI membahas penanganan bencana di beberapa daerah yang gagal panen dengan 3 Kementerian beserta Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Keuangan.

“Bagaimana mereka melakukan hidup sehari-hari menjadi tidak ada

kejelasan, sementara dalam rencana anggaran penanganan banjir tidak ada kejelasan anggaran Asuransi untuk petani. Padahal dalam UU No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengamanatkan hal tersebut,” ungkapnya.

Dikutipnya Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, serangan

organik pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim dan resiko-resiko lain yang diatur oleh Peraturan Menteri.

Selain itu, Anton Sukartono menambahkan untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan teknologi pertanian, Kementerian Pertanian diminta melakukan inovasi teknologi untuk meningkatkan produksi pangan.

Diungkapkannya, selama ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran bagi petani yang gagal panen kurang lebih sebesar 270 – 300 Milyar pertahun, sebagai anggaran darurat pangan sesuai dengan UU No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Petani, anggaran ini untuk pergantian produksi, benih baru, dan pematang.

“Bagaimana saat ini pelaksanaannya, karena sejumlah daerah yang ter-

kena banjir dan gagal panen seperti di Kendal, Pati, Kerawang dan kabupaten pesisir Selatan Sumatera Barat belum mendapatkan bantuan sejenis baik dari Pemerintah Daerah maupun dari Pemerintah Pusat,” kata Anton .

Hal senada disampaikan Nabiel Al Musawa (F-PKS) menginginkan Asuransi Pertanian segera dilaksanakan oleh pemerintah untuk men-



Anggota Komisi IV DPR Nabiel Al Musawa.

jamin kesejahteraan petani.

Dia menjelaskan total kebutuhan anggaran untuk memenuhi sesuai dengan undang-undang baik UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan juga UU tentang Pangan, maka salah satunya adalah Asuransi terhadap gagal panen.

Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo dalam kesempatan tersebut mengungkapkan Komisi IV sering ditanya oleh masyarakat di desa. “Kami ini mendengar DPR membahas APBN Rp 1.800 triliun setiap tahunnya. Pertanyaannya adalah kalau untuk membangun sentra pertanian, peternakan dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia membutuhkan berapa? ujanya mengutip pertanyaan petani, dan kata Firman hal itu belum terjawab. (as) foto :ry/parle.

Kepemilikan Asing Dalam Penyiaran Perlu Dilarang

Rapat Panja Penyiaran Komisi I DPR RI dengan pemerintah ada “kejutan” yang disampaikan pemerintah. Pada Rapat Kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan tersebut pemerintah menjelaskan tentang kesepakatan yang dilakukan pemerintah dalam kerangka kesepakatan cetak biru komunitas Bisnis ASEAN yang termasuk didalamnya bidang penyiaran sebagai salah satu alasan dari penetapan diberikannya ijin kepemilikan asing di bidang penyiaran sebesar 20 % sebagaimana diusulkan pemerintah.



Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiq.

Reaksi “keras” namun tetap santun langsung muncul dari kalangan Anggota Komisi I DPR RI. Fraksi PKS, Mah-

fudz Sidiq dengan tegas menyatakan bukan soal ada kesepakatan perjanjian atau ada UU BUMN atau UU yang mengatur investasi lainnya karena menurut Mahfudz, UU BUMN sendiri sangat liberal jadi tidak bisa kita memberikan *equal treatment* alias memberikan perlakuan yang sama antara penyiaran dengan bisnis lainnya. Lebih lanjut Mahfudz menegaskan perlu dilakukan kajian komprehensif terkait dengan masalah kepemilikan asing di bidang penyiaran tersebut.

“Jadi posisi DPR dengan pemerintah masih berbeda,” tegasnya.

Dalam posisi pembahasan RUU Penyiaran, DPR RI mengusulkan kepemilikan asing pada bidang penyiaran 0% alias dilarang sama sekali sama seperti proteksi yang diberlakukan di negara Korea Selatan, Mexico dan Australia.

Sementara pemerintah menjelaskan telah disepakatinya cetak biru Komunitas Bisnis ASEAN (*ASEAN Economic Community Blueprint*) sebagai dalih usulan pemerintah yang membuka peluang kepemilikan asing dibidang



Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya.

jasa penyiaran sebesar 20 %. “Jadi 20 % itu masih jauh dari kesepakatan dalam Cetak Biru Komunitas Bisnis ASEAN,” terang pemerintah.

“Kalau tentang kekhawatiran perlunya menjaga identitas bangsa kita kan memiliki KPI,” imbuh pemerintah. Pemerintah menjelaskan dalam cetak biru Komunitas Bisnis ASEAN tersebut disepakati untuk membuka peluang antar negara ASEAN paling tidak 49 % di tahun 2009, 50 % ditahun 2010 dan 70 % pada tahun 2015. Sungguh sebuah peluang yang sangat fantastis sekali-gus gegabah.

“Jasa penyiaran terkait dengan

frekuensi dan itu adalah masalah kedaulatan. Idealnya industri yang terkait dengan kedaulatan harus bebas dari modal asing,” kata Tantowi Yahya (FPG) yang menyepakati usulan Mahfudz Sidiq agar masalah penentuan

diperbolehkan atau tidaknya peluang modal asing masuk dalam bidang pe-nyiaran dikaji secara lebih mendalam.

Bahkan Mahfudz Sidiq mengusulkan agar Komisi I DPR RI membahas

masalah tersebut dalam kerangka berpikir *national security* dengan mengundang berbagai *stake holder* yang terkait dengan masalah *national security*. (mp)/foto:iwan armanias/parle/andri*

Komisi VIII Berharap RUU Pekerja Sosial Tidak Tumpang Tindih dengan UU Lain

Komisi VIII DPR RI mengungkapkan bahwa penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pekerja Sosial harus diidentifikasi dan diharmonisasi dengan Undang-undang yang telah ada sebelumnya, agar tidak tumpang tindih dan tidak terjadi duplikasi undang-undang.

“Tingkat Urgensi akan pekerja sosial mengharuskan kita untuk menjustifikasi pentingnya UU tentang Pekerja Sosial yang akan mengatur profesi pekerja sosial dan praktik pekerjaannya. Namun dalam menyusun undang-undang tersebut juga harus diperhatikan pertimbangan aspek yuridis, selain aspek filosofis, dan sosiologis. Disini saya melihat telah ada beberapa Undang-undang yang berkaitan dengan pekerja sosial, karena itu diperlukan identifikasi dan harmonisasi dengan Undang-undang yang telah ada sebelumnya, agar tidak tumpang tindih dan terjadi duplikasi peraturan atau undang-undang,” ungkap anggota Komisi VIII DPR Manuel Kaisiepo dalam RDP dengan KPSI (Konsorsium Pekerja Sosial Indonesia) dan IPSPI (Ikatan Pekerja Sosial Professional Indonesia), Senin (3/2).

Pengantisipasi terjadinya tumpang tindih dan duplikasi dalam undang-undang itu melihat dalam praktiknya, pekerja sosial dituntut untuk berkerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait, karena permasalahan yang ditangani oleh pekerja sosial beragam dan mencakup berbagai bidang yang sangat luas, seperti bidang kesehatan, bencana alam, dan agama juga penanganan fakir miskin. Dimana kesemua bidang tersebut telah memiliki peraturan dan undang-undang.



Anggota Komisi VIII DPR Manuel Kaisiepo.

Dalam penanganan fakir miskin misalnya, telah ada Undang-undang No.13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin yang kurang lebih juga menyinggung tentang praktik pekerja sosial. Begitupun dengan UU No.4 Tahun 2007 Tentang Penyandang Disabilitas, UU Kedokteran, dan UU Tentang Keperawatan yang notabene juga berkaitan dengan pekerja sosial.

Meski demikian Manuel mengapresiasi masukan dari KPSI dan IPSI yang sangat membantu dalam penyusunan RUU tentang pekerja sosial ini. (Ayu)/foto:iwan armanias/parle/andri*

Komisi V Apresiasi Pembangunan Pelabuhan dan Bandara Fakfak

Tim Komisi V DPR-RI dipimpin Michael Wattimena melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Papua Barat guna memantau perkembangan pembangunan Pelabuhan dan Bandara Fakfak. Kunjungan yang dilakukan awal bulan ini, mendapat sambutan baik dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Fakfak. Tim DPR didampingi pejabat kementerian terkait, termasuk melakukan peninjauan program pembangunan di bidang infrastruktur dan transportasi.

Kepada Tim Komisi V Bupati Fakfak Muhammad Uswanas menyampaikan penghargaan kepada rombongan DPR, karena banyak program berupa pengembangan ruas jalan-jalan nasional yang diperjuangkan oleh Komisi V serta pembukaan baru jalan nasional, ruas jalan Bomberay, ruas jalan Teluk dan ruas jalan ke Kampung Siboru.

Uswanas juga memaparkan hasil-hasil kerja yakni, relokasi pembangunan Pelabuhan Kokas. Termasuk

pengembangan Pelabuhan Fakfak yang panjangnya 70 meter dan sisanya 26 meter, ditargetkan 2 bulan kedepan bisa tuntas.

Lebih lanjut dikatakan, perhatian pemerintah pusat melalui Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, dalam pembangunan Pelabuhan Fakfak begitu besar karena dalam beberapa tahun terakhir ini Pelabuhan Fakfak terus dikururkan dana untuk perpanjangan dermaga.



Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena memimpin kunjungan spesifik ke Fakfak.

Pelabuhan Fakfak pada tahun 2010 hanya mencapai kepanjangan dermaga 200 meter, kini diperpanjang lagi 70 meter dengan melalui anggaran 2013 lalu. Sementara untuk tahun 2014 ini akan diperpanjang lagi 26 meter, sehingga nantinya dermaga pelabuhan Fakfak yang merupakan salah satu pintu gerbang masuk di Kota Fakfak akan mencapai panjang dengan total 296 meter.

“Dengan panjang dermaga 296 meter, maka aktifitas bongkar muat tidak akan terganggu,” demikian disampaikan Kepala Administrator Pelabuhan Fakfak Daniel Iba dalam pertemuan tersebut.

Menhub resmikan

Di sela-sela kunjungan Komisi V DPR RI dan sejumlah Pejabat Kementerian yang terkait memantau kondisi Infrastruktur Pelabuhan Fakfak di Provinsi Papua Barat, Bupati Fakfak Muhammad Uswanas meminta Komisi untuk meneruskan kepada Menteri Perhubungan EE. Mangindaan untuk bisa meresmikan Pelabuhan Fakfak dari 200 meter menjadi 296 meter yang rencananya selesai Maret 2014.

“Saya sampaikan kepada Pak Michael Wattimena, dengan harapan Menhub EE. Mangindaan untuk datang dan meresmikan Pelabuhan Fakfak. Kalau

bisa sebelum Pemilu, Pelabuhan Fakfak sudah diresmikan,” kata Uswanas.

Dia berharap, agar tidak terjadi kecelakaan pesawat seperti tahun-tahun sebelumnya, kepada Komisi V DPR RI untuk memberi perhatian mempercepat pembangunan Bandara di Kampung Siboru Distrik Fakfak Barat. “Saya besok lusa ke Manokwari, saya akan bertemu dengan Menteri Perhubungan dan akan menyampaikan permintaan Bapak Bupati untuk meresmikan Pelabuhan Fakfak dan peresmian pembangunan Bandara Distrik Fakfak di Kampung Siboru,” tegas Michael Wattimena.

Michael Wattimena mengapresiasi permasalahan dan masukan yang disampaikan Bupati Fakfak, sebab merupakan sebuah rencana dan program utama yang digalakkan oleh Komisi-V DPR-RI.

Usai meninjau pembangunan bandara tersebut Tim Komisi V didampingi Sekda Fakfak menuju Distrik Bomberay untuk meninjau irigasi dan peternakan sapi yang ada di wilayah tersebut. Untuk menjamin ketahanan pangan yang baik maka harus ada irigasi yang memadai. “DPR akan meneruskan masukan kepada pemerintah pusat guna membantu dan segera mengucurkan dana sehingga infrastruktur pengairan rakyat tersebut bisa terwujud,” kata Wattimena menambahkan. (hr).

RUU Keinsinyuran Minimalisir Malapraktik Kegiatan Keteknikan



Ketua Pansus RUU Keinsinyuran Rully Chairul Azwar.

Penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Keinsinyuran dilatarbelakangi dari banyaknya kasus malapraktik dalam kegiatan keteknikan. Diharapkan, dengan adanya RUU ini, dapat meminimalisir bentuk malapraktik yang merugikan masyarakat.

Hal itu disampaikan dalam konferensi pers oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Keinsinyuran Rully Chairul Azwar didampingi oleh Wakil Ketua Pansus Roestanto Wahidi dan Alimin

Abdullah. Konferensi pers berlangsung di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Gedung Nusantara I, Selasa (4/02), dan dihadiri oleh beberapa media nasional.

“Penyusunan RUU Keinsinyuran ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, diantaranya banyaknya kasus malapraktik dalam kegiatan keteknikan. RUU ini mengatur pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan proses dari seorang sarjana teknik menjadi insinyur yang kompeten untuk bekerja memikul

tanggung jawab keselamatan dan keamanan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan,” jelas Rully.

Selain itu, tambah Rully, jumlah sarjana teknik yang masih rendah dibanding negara lain, dikhawatirkan tenaga asing akan memenuhi tenaga sarjana teknik Indonesia, apalagi menjelang *Asean Economic Community* 2015.

“Jumlah sarjana teknik Indonesia rendah dibanding negara lain. AEC 2015 sebentar lagi akan berlaku, jika tidak jumlah tidak ditingkatkan, tenaga asing akan memenuhi kebutuhan pembangunan Indonesia, karena semakin terbukanya jasa keinsinyuran,” imbuh Politikus yang juga Anggota Komisi X ini.

Politisi Golkar ini juga menilai, profesi insinyur di Indonesia masih memiliki banyak cabang, namun belum tertata dengan baik. Sehingga, jika tidak dilindungi oleh aturan perundangan, pada era berlakunya AEC 2015 nanti, insinyur Indonesia akan semakin terdesak.

“Saat insinyur asing bekerja di Indonesia, gajinya jauh lebih tinggi dibanding gaji insinyur Indonesia. Padahal kemampuannya belum tentu lebih tinggi daripada insinyur kita,” ujar Politisi asal Dapil Bengkulu ini.

RUU ini berisi 15 Bab, dan terdiri dari 55 Pasal. Salah satu amanah dalam RUU ini adalah pembentukan lembaga baru, yakni Dewan Insinyur Indonesia (DII), yang nantinya akan bertugas melakukan uji kompetensi dan pengawasan profesi insinyur.

“Sedangkan, untuk insinyur asing yang bekerja di Indonesia, harus mengikuti uji kompetensi. Atau jika dia sudah memiliki sertifikasi profesi, akan disetarakan lebih dahulu,” tambah Rully.

Rully menjelaskan, RUU Keinsinyuran merupakan inisiatif DPR sejak 2012 dan sudah dibahas selama dua kali masa persidangan, dan saat ini sudah selesai pembahasannya.

“Pansus menargetkan, RUU Kein-

sinyuran ini bisa disetujui pada Persetujuan Tingkat I di Pansus pada minggu depan. Dan minggu berikutnya bisa disetujui untuk menjadi Undang-undang pada Rapat Paripurna,” jelas Rully.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Rudianto Handojo menyambut baik RUU Keinsinyuran ini. Dengan adanya RUU ini, diharapkan profesi insinyur akan terlindungi.

“Karena tidak ada UU yang mengatur profesi insinyur ini, mengakibatkan profesi ini tidak dilindungi dan remunerasi menjadi rendah. Kalau ada UU Keinsinyuran, setiap resiko dianggap dilindungi, dan bukan hanya penyetaraan pendidikan, juga penyetaraan perlindungan. Selain itu, UU ini juga mengatur soal tenaga insinyur asing, sehingga komposisi insinyur Indonesia akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri, karena ini masalah tanggung jawab keselamatan dan keamanan,” ujar Rudianto. (sf)/foto:iwan armanias/parle/andri*

Pemberantasan Produk Illegal Online Mirip Pemberantasan Situs Porno

Penjualan produk ilegal melalui situs *online*, seperti kosmetik yang *notabene* merupakan jenis obat-obatan cukup meresahkan masyarakat. DPR RI meminta Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) dapat memberantas penjualan produk ilegal ini.

Anggota Komisi IX Poempida Hidayatulloh menyatakan, pemberantasan produk ilegal di situs-situs *online* mirip pemberantasan penyebaran *content* porno. BPOM mesti bekerja dengan pihak penyedia internet di Indonesia.

“Pemberantasan obat-obatan ilegal di *online* mirip dengan pemberantasan porno di situs-situs. Mungkin BPOM bisa bekerjasama dengan provider internet. Bahkan, bila perlu situs-situs *online* itu di *suspend*, dan diarahkan ke situs BPOM, dimana ada penjelasan kalau produk yang dijual itu ilegal,” jelas Poempida saat Raker dengan BPOM di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nu-



Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh.

santara II, Selasa (4/02).

Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi IX Dinajani Mahdi. Ia menilai, BPOM harus bisa bekerja seperti FBI. Sehingga dapat memberantas secara tuntas penyebaran produk ilegal ini.

“BPOM juga dapat membuat *mapping* untuk daerah rawan penyebaran produk ilegal. Bila perlu, anggarannya

ditambah lagi. Ini, kerjanya banyak, tapi anggarannya sedikit,” ujar Dina.

Sementara itu, dalam paparannya, Kepala BPOM Roy M Sparringa menyatakan bahwa upaya untuk memberantas obat dan makanan ilegal dengan pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal. Hasilnya, cukup banyak produk ilegal diberantas dari pasaran.

“Pada 2013, BPOM telah melaksanakan pemusnahan obat dan makanan ilegal di BPOM Pusat dan 18 Balai Besar, dengan total produk 21.760 produk, senilai Rp 22,470 miliar,” jelas Roy.

Selain itu, Roy menyatakan pihaknya juga terus menggelar Operasi Storm. Operasi ini adalah kegiatan pemberantasan obat malaria palsu di daerah yang merupakan endemik wilayah penyakit malaria, seperti di Nusa Tenggara. (sf)/foto:iwan armanias/parle/odjie*

Wakil Bicara

“Kalau ternyata (Merpati) itu sulit untuk dibangkitkan, sebenarnya tak ada masalah jika di likuidasi. Sebenarnya, itu hal yang biasa dalam dunia bisnis. Di dunia bisnis itu, siapa yang efisien dan kompetitif itu bisa tumbuh, yang tidak, maka akan punah. Jadi menurut saya, Pemerintah harus melakukan kajian secara serius tentang Merpati. Apakah Merpati ini punya potensi untuk tumbuh atau tidak. Kalau tidak ada potensi, mau tidak mau ya bisa musnah,”



Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman



Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning

Ada hikmahnya saya bisa merasakan kalau kita pejabat negara saja ditolak dari rumah sakit atau tidak dilayani dengan baik, apalagi rakyat miskin yang di kelas III yang tidak terlayani dengan baik karena adanya BPJS.



Anggota Komisi VIII DPR Kasma Bouty

Saya berharap agar Internet dan SMS Banking juga bisa digunakan untuk membayar BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Hal itu tentu sangat memudahkan umat karena tidak perlu berlama-lama mengantri di Bank, selain itu umat juga dengan mudah bisa mengetahui sudah seberapa besar dana haji yang telah mereka setorkan.

Komisi V Serap Informasi Infrastruktur DIY

Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik di Kabupaten Kulonprogo, Rabu (5/2/2014). Rombongan yang dipimpin Laurens Bahang Dama diterima Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo di Gedung Kaca, dan dihadiri pula sejumlah pejabat Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan perwakilan pejabat kabupaten atau kota se-DIY.

Rombongan Komisi V DPR RI menjangring aspirasi dari pemkab/kota di DIY terkait dampak bencana alam terhadap infrastruktur. Dalam kesempatan itu, perwakilan dari kabupaten atau kota memaparkan persoalan infrastruktur masing-masing.

Dikatakan Laurens Bahang Dama, peristiwa bencana alam terjadi di berbagai daerah menimbulkan berbagai dampak signifikan pada infrastruktur serta perekonomian daerah. “Kami memiliki fungsi antara lain pengawasan, *budgeting*, ingin melihat hal-hal spesifik, khususnya dampak banjir dan bencana terhadap infrastruktur.

Karena jalur Jogja-Cilacap sebagai jalur alternatif saat jalur Pantura kena banjir, makanya harus dicari solusi alternatif, karena saat utara banjir, arus barang dan jasa terganggu,” katanya seraya menambahkan bahwa melalui kunker ini ingin mendapatkan informasi dari pemkab terkait infrastruktur, karena dalam waktu dekat akan mengadakan rapat dengan pemerintah, sehingga dapat dicari solusi yang terbaik.

DPR Harap Pemerintah Prioritaskan Honorer Kategori Dua (K2)

DPR berharap pemerintah mempertimbangkan untuk memprioritaskan honorer kategori dua (K2) yang gagal jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk direkrut menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) Azwar Abubakar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/2).

“Kalau pemerintah telah menutup penerimaan CPNS dari honorer tertinggal, kami bisa maklumi. Namun,

kami meminta pemerintah untuk memberikan prioritas utama bagi honorer yang gagal CPNS masuk dalam penerimaan PPPK,” kata Agun.

Politisi dari Partai Golkar itu mengatakan, di dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN), memang disebutkan untuk PPPK harus orang yang berkompentensi dan rekrutmen harus lewat tes. Namun, kata Agun, langkah bijaknya bila honorer K2 yang gagal diberikan kesempatan lebih dahulu untuk ikut tes seleksi PPPK.

“Jangan dulu dibuka untuk lain, berikan kesempatan pertama dulu untuk honorer ikut tes. Saya yakin, di antara mereka tidak sedikit yang punya kom-



Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama memimpin kunjungan spesifik ke Kulonprogo.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo dalam kesempatan itu melaporkan, beberapa infrastruktur yang perlu dukungan baik dari Pemda DIY maupun Pemerintah Pusat melalui APBN. Antara lain peningkatan jalan Nasional dari Jogja-Temon, pembangunan JJLS, pembangunan sarana pendukung seperti air bersih untuk bandara dan pabrik pasir besi, pengaspalan jalan ke pabrik di Sentolo sepanjang 4 km x lebar 14 m senilai Rp 15 Miliar, jalan bedah Menoreh untuk wisatawan dari Bandara ke Borobudur dan tempat wisata.

Hasto berharap ada upaya penanganan dari pemerintah pusat terhadap jalur jalan nasional dan jalur jalan lintas selatan (JJLS) untuk mendukung pengembangan ekonomi dan kebutuhan infrastruktur di Kulonprogo. Sebab ke depannya juga akan ada beberapa megaprojek seperti bandara, pelabuhan perikanan, penambangan pasir besi dan juga pengembangan kawasan ekonomi eksklusif (KEE) di Sentolo.

“Sedangkan yang terkait dengan banjir yaitu pembuatan sudetan sungai Peni-Serang karena sangat penting untuk mengatasi banjir sepanjang 1,6 km x lebar 12 m senilai Rp 8 Miliar,” kata Hasto. (as)



Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa didampingi Wakil Ketua Arif Wibowo.

petensi,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Azwar Abubakar mengatakan pihaknya menyetujui usulan Komisi II DPR agar honorer kategori dua (K2) yang gagal CPNS diprioritaskan dalam rekrutmen PPPK nantinya. Hanya saja, Azwar menegaskan, honorer K2 yang nantinya gagal itu harus tetap melalui proses tes un-



tuk menjadi PPPK. “Kami setuju-setuju saja kalau honorer K2 yang gagal CPNS ikut seleksi PPPK. Tapi bukan berarti harus masuk ya, karena semua harus dites,” ujarnya.

Sementara itu, selain merekomendasikan K2 yang gagal jadi CPNS untuk dilakukan rekrutmen menjadi PPPK, Komisi II DPR juga mendesak agar pemerintah tidak menunda lagi pengumuman honorer kategori dua (K2). “Komisi II meminta pemerintah tidak

menunda lagi pengumuman honorer K2,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo.

Arif mengatakan, secara lembaga Komisi II DPR juga mendesak pemerintah untuk menjelaskan ke publik alasan penundaan pengumuman honorer K2 yang terjadi beberapa kali. Sebab penundaan itu telah menimbulkan kecurigaan masyarakat. “Pemerintah harus membuat *press release* dan disebar ke media massa kenapa sampai ada

penundaan pengumuman,” tegasnya.

Terhadap hal ini, MenPAN-RB menyatakan, pengumuman honorer K2 karena pihaknya butuh waktu panjang untuk memvalidasi datanya. “Kalau tidak salah penundaan hanya dua kali kok. Saya jamin ini tidak ada kaitannya dengan lobi-lobian. Lagipula siapa melobi siapa karena nama-nama honorer tidak ada yang kami kenal,” tandasnya. (nt)/foto:rizka/parle/iwan.

Marzuki : Parlemen Kita Sebaiknya Satu Kamar

Tunisia berhasil membentuk parlemen satu kamar dari sebelumnya dua kamar. Dan parlemen kitapun sebaiknya merubah menjadi satu kamar saja. Dengan begitu, ada efisiensi anggaran dan juga efisiensi pembahasan legislasi.

Demikian disampaikan Ketua DPR Marzuki Alie usai menerima Dubes Tunisia di ruang kerjanya, Senin (3/2). Diskursus menjadikan parlemen kita satu kamar sangat terbuka, mengingat selama ini praktik tiga kamar (MPR, DPR, DPD) dinilai Marzuki sangat boros. “Sebetulnya bisa saja, kalau anggota

DPR sepakat. Sekarang ini 3 kamar, menurut saya sangat boros. Sebaiknya satu kamar sudah cukup,” papar Marzuki.

Merujuk pada parlemen Tunisia yang berhasil menyederhanakan parlemennya, maka peran legislatif di Indonesia juga bisa disederhanakan kembali. DPD yang selama ini terpisah dan tidak bisa langsung terlibat dalam membahas UU, bisa melebur ke fraksi-fraksi di DPR atau membentuk fraksi sendiri. Namun, pemilihannya tetap secara langsung dipilih oleh rakyat.



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

Dalam satu kamar itu, lanjut Marzuki, cukup DPR saja yang berperan. Semuanya tentu memperjuangkan aspirasi rakyat. Dan DPD tetap mengutus 4 wakilnya setiap provinsi untuk membentuk fraksi sendiri. “Bisa juga mereka menjadi satu fraksi sendiri. Saya kira itu lebih baik daripada membuat lembaga baru. Biayanya bisa lebih hemat,” ujar Marzuki. (mh)/foto:iwan armanias/parle/odjie*

Komisi VII DPR Pertanyakan Komitmen Calon DEN Terkait Energi Nasional

Komisi VII DPR mempertanyakan komitmen calon anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dalam menjaga ketahanan energi nasional. Hal itu mengemuka saat Komisi VII DPR mengadakan *fit and proper test* calon anggota DEN yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana, baru-baru ini.

“Kita meminta tanggapannya terkait carut-marut pengelolaan energi nasional dimana besar sekali subsidi PLN hampir 95 Triliun,” ujar Saifudin Donodjyo dari Fraksi Gerindra.

Selain itu, lanjut Saifudin, dia juga mempertanyakan kondisi elektrifikasi di kawasan Indonesia timur dimana masih minimnya akses terhadap listrik. “Bahkan didaerah penghasil energi juga seperti ayam mati di lumbung,”



Anggota Komisi VII DPR Ali Kastela.

terangnya kepada calon anggota DEN A. Feiral Rizki Batubara.

Saifudin juga mempertanyakan pendapat calon anggota DEN terkait pengelolaan listrik oleh swasta dan persoalan *open akses* serta akuisisi PGN.

Anggota DPR dari Hanura Ali Kastela mempertanyakan bagaimana calon DEN mensiasati kebijakan energi yang murah, mudah serta merata. “Kebutuhan kita terhadap energi sangat besar sekali karena itu, bagaimana anda mempersiapkan pengelolaan energi alternatif meskipun kita tahu dari sisi investasi dan pembiayaan butuh waktu yang cukup lama, bagaimana membuat semacam keseimbangan antara energi yang bersumber dari fosil ke non fosil,” katanya. (si)/foto:iwan armanias/parle.

terangnya kepada calon anggota DEN A. Feiral Rizki Batubara.

Komisi III Minta KY Kirim Calon Hakim Agung Berkualitas



Suasana rapat Komisi III DPR.

Sejumlah anggota Komisi III menyampaikan kekecewaan terhadap 3 calon hakim agung hasil seleksi Komisi Yudisial. Beberapa kekurangan mendasar dari kandidat yang semuanya berlatar belakang hakim karir mendapat sorotan.

“Paper mereka jauh dari standar seorang calon hakim agung. Kemudian saat saya tanya soal masalah bebas murni, menurut hemat saya kandidat tidak menguasai. Dalam UU kita hanya ada bebas atau tidak bebas, jadi seharusnya dia paparkan saja bebas menurut KUHP, KUHPA begini, menu-

rut pakar begini. Bebas murni itu kan bisa-bisanya penegak hukum saja. *Fit and proper* ini kita lakukan ketat, ini kan untuk kepentingan rakyat banyak. Jadi sekarang KY bisa mengirim kandidat lain, lebih berkualitas setiap saat kepada kita,” kata anggota Komisi III Nudirman Munir usai rapat pleno di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (4/2/14).

Sementara itu Ketua Komisi III Pieter C. Zulkifli menyebutkan indikasi lain. Ketika menanyakan soal kemungkinan pihak-pihak tertentu melakukan intervensi kasus para kandidat gagal menjawab dengan lugas.

“Bagaimana kalau hakim diintervensi oleh seseorang dalam membuat putusan. Jawabannya harus tegas, tidak bisa, cukup dijawab 1 detik, tapi mereka menjawab panjang dan bersayap,” papar Politisi FPD ini.

Anggota FPG Gandung Pardiman yang ditugaskan fraksinya mengikuti pleno Komisi III, berbicara lebih lantang. “Tiga kandidat yang dipilhkan dibawah standar, *membre*. Kok calon ecek-ecek seperti ini KY berani menyerahkan ke Komisi III,” tandasnya.

Menyikapi kondisi ini komisi hukum menjadwalkan akan segera menggelar rapat konsultasi dengan KY terutama untuk mengetahui parameter dalam menilai kandidat hakim agung yang dikirimkan ke DPR. (iky)/foto: iwan armanias/parle/andrie*.

Bila UN Bermasalah, Komisi X Takkan Setujui Anggaran UN 2015

Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri menegaskan, pihaknya mendukung anggaran Ujian Nasional (UN) tahun 2014, namun diminta tidak terjadi seperti UN tahun 2013 lalu. “Bila masih bermasalah, kita pastikan Komisi X tidak akan menyetujui anggaran UN tahun 2015,” katanya kepada pers usai memimpin pertemuan Tim Komisi X dengan Kadis Dikbud Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajaran, Kamis (30/1/2014).

Menurut Syamsul, kepada Mendikbud sudah wanti-wanti bahwa DPR tidak ingin kekisruhan pelaksanaan UN 2013 terjadi lagi. Hasil kunjungan ke Sulsel ini adalah dalam rangka pengawasan, apakah pemerintah siap untuk menyelenggarakan UN.



Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri.

Ditegaskan kembali, UN 2014 harus diselenggarakan dengan penyelenggaraan yang lebih baik. Pertama, distribusi soal supaya diselenggarakan di daerah, tidak desentralisasi. Kemudian pengawasan dan anggaran diperketat sehingga tidak ada kebocoran.

“Kami tidak ingin mereka bilang siap tetapi dilapangan tidak. Dan mereka minta percetakan dan segalanya dipercayakan kepada daerah,” tandas politisi Partai Golkar.

Terkait dengan nilai UN yang tinggi, tidak boleh beranggapan hal itu menggambarkan kualitas anak. Selain itu, masalah substansi, dimana materi yang ada pada UN tidak menggambarkan topik dari kelas satu sampai kelas tiga, tapi cukup topik materi di kelas 3 saja.

Yang terpenting, lanjutnya, jangan sampai terjadi kesulitan dalam distribusi soal dan tidak terjadi kebocoran soal. Sedangkan, soal penyelewengan anggaran pihaknya meminta BPK dan

menteri agar di audit agar tidak ada rumor-rumor yang mencurigakan.

Sementara anggota Tim Komisi X, TB Dedy S. Gumelar yang akrab disapa Mi'ing mengatakan, sejak dulu sampai sekarang tetap konsisten menentang keras dan menolak UN sebagai alat kelulusan. "Kesimpulannya politik pendidikan Indonesia amburadul, karena keluar dari filosofi pendidikan. Pasalnya, tujuan dari konteks pendidikan adalah mencerdaskan bangsa dan membangun watak bangsa," katanya.

Sementara, lanjutnya, ukuran kecerdasan di Indonesia ialah kalau anak tersebut nilai fisiknya 9 anak itu berarti cerdas. Kalau anak tersebut nilai



Anggota Komisi X DPR Dedy Suwandi Gumelar.

matematikanya 9 anak itu cerdas. Dan kalau agamanya 9 berarti itu anaknya baik, atau olahraganya 9 itu anak berbakat.

Menurut Mi'ing, sebenarnya kompetensinya beda, sehingga antar daerah juga berbeda. "Selama sistem kita seperti ini, kita bisa frustrasi. Ini masalah yang tidak mudah. Yang saya ingin bilang, tunggu ganti rezimnya saja," katanya menambahkan.

Kunjungan spesifik Komisi X DPR RI terdiri atas 8 orang dipimpin Syamsul Bachri dari sejumlah anggota lintas fraksi yakni Sri Novida dari F-PD; Oelfah A Syahrullah Harmanto dari F-PG; TB. Dedi Suwandi Gumelar dari F-PDI Perjuangan; Ahmad Zainuddin dari F-PKS; Dedi Wahidi dari F-PKB; Nuroji dari F-Partai Gerindra; dan Muchtar Amma dari F-Partai Hanura. (iw)/
foto:iwan armanias/parle.

Perlu Bantuan Prasarana dan Sarana Produksi Pengganti di Daerah Banjir

Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan koordinasi lintas sektor secara intensif dalam rangka pemulihan areal pertanaman dan pembudidayaan yang rusak di daerah-daerah yang terkena bencana alam, dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia pada APBN 2014.

"Pemberian bantuan prasarana dan sarana produksi pengganti, termasuk biaya produksi bagi petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan di daerah-daerah yang terkena bencana alam," kata Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo.

Dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan, Guna membahas penanggulangan dan pengendalian bencana terkait fenomena banjir di beberapa daerah yang mengakibatkan kerusakan gagal panen serta merugikan petani, peternak, dan pembudidaya ikan. Senin (3/2) di Gedung Parlemen, Senayan.

Firman Subagyo menjelaskan sejak beberapa waktu lalu Indonesia dilanda banyak bencana alam antara lain erupsi Gunung Sinabung di Sumatera



Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo.

Utara, banjir bandang dan tanah longsor di Sulawesi Utara, hingga banjir yang melanda daerah sepanjang Pantai Utara Pulau Jawa.

Akibat bencana tersebut, telah menyebabkan terganggunya kegiatan sektor agribisnis yang merugikan para petani, meliputi kerusakan lahan, jalan usaha tani maupun sarana irigasi. "Jika banjir terus menerus akan menyebabkan gangguan target produksi padi tahun 2014," katanya.

Dijelaskannya bahwa kerugian pada sektor pertanian khususnya kerugian yang dialami oleh petani diatur melalui UU No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengamanatkan Strategi perlindungan petani dilakukan melalui ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa dan melalui asuransi pertanian.

Selain itu UU tersebut juga menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

"Ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh asuransi pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau peternakan yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik dan atau rusaknya infrastruktur pertanian," papar Firman Subagyo.

Untuk sektor kehutanan, Komisi IV meminta Kementerian Kehutanan melakukan aksi tanggap darurat dan rencana pemulihan pasca bencana, dalam upaya penanggulangan dan mitigasi bencana banjir dan longsor di Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS), terutama di DAS prioritas di Pulau Jawa.

Selanjutnya, ditegaskannya terkait banjir yang merusak areal tambak atau budidaya ikan di berbagai daerah. Komisi IV juga meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pemulihan pasca bencana. (As)/
foto:rizka/parle/iwan.

Persiapan Menuju Asean Community 2015 Masih Lemah

ASEAN Community 2015 berlangsung tak kurang dari setahun lagi. Namun, Anggota Komisi IX Rieke Diah Pitaloka menilai, persiapan Indonesia dalam menyambut Pasar Terbuka ini masih sangat lemah.

“Persiapan menghadapi ASEAN Community 2015 masih sangat amat lemah. Secara keseluruhan, saya tidak melihat satupun ada Kementerian (yang siap). Paradigma pemerintahan saat ini, hanya meletakkan Indonesia dalam Asean Community lebih pada posisi untung rugi secara bisnis. Dia tidak melihat apa dampaknya terhadap rakyat, terutama mereka yang bekerja,” kata Rieke saat ditemui di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara II, Senin (3/02).

Politisi PDI Perjuangan ini khawatir, dimana tahun ini merupakan tahun pergantian pemerintahan, akan semakin membuat Indonesia tidak siap menghadapi ASEAN Community 2015.

“Dengan persiapan yang masih kurang matang, apa Pemerintah siap untuk mengantar Indonesia ke Pasar Bebas ASEAN 2015? Belum lagi pemerintahan saat ini yang sebentar lagi selesai. Sementara soal buruh yang sepertinya gak akan pernah selesai,” cetus Rieke.

Oleh karena itu, tambah Rieke, pihaknya mendesak agar Pemerintah yang berkuasa saat ini jangan hanya memasukan rakyat yang bekerja ke kuburan Pasar Bebas ASEAN.



Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka.

Karena setelah itu Pemerintah tidak memerintah lagi.

“Selain itu, kepada teman-teman buruh juga harus mendesak, berjuang bersama, karena nanti bisa terjadi permasalahan yang besar jika tidak ada proteksi, bukan hanya kepada buruhnya, tetapi juga industri nasional yang sangat lemah,” imbuh Rieke. (mh,sf)/foto:iwan armanias/parle/odjie*

KPPU Jadi Sorotan Pembahasan UU Larangan Praktek Monopoli



Wakil Ketua Baleg DPR Dimiyati Natakusumah.

Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi DPR RI dengan Pande Radja Silalahi dan Ningrum Natasya Sirait di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Jakarta, Rabu (29/1).

Rapat Dengar Pendapat Umum Baleg guna menghimpun masukan bagi penyusunan draft RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dipimpin Wakil Ketua Baleg, Ahmad Dimiyati Natakusumah.

Menurut Pande Radja Silalahi, kewenangan yang diberikan UU Nomor 5 Tahun 1999 masih kurang mendukung tugas sebagaimana diamanatkan UU Nomor 5 Tahun 1999 kepada KPPU.

Menurut Pande, agar dapat melak-

sanakan UU ini secara efisien dan efektif yang sesuai dengan tujuan pembentukannya, maka KPPU perlu diberi kewenangan yang menyangkut antara lain, kewenangan untuk mendapatkan alat bukti atas inisiatif KPPU, kewenangan menentukan teknis pelaksanaan merger, peleburan, penggabungan dan pengambilalihan, kewenangan memerintahkan pelaku usaha menghentikan kegiatannya sementara untuk menghindari kerugian yang lebih besar, kewenangan meletakkan sita atas benda milik terdakwa untuk menjamin pembayaran denda/ganti rugi dengan ijin pengadilan dan kewenangan meminta bantuan pihak Kepolisian dalam hal menegakkan kepatuhan pelaku usaha dalam proses pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1999

dan kepatuhan melaksanakan putusan KPPU sesuai waktunya.

Salah satu masalah yang menonjol yang belum terselesaikan sejak diberlakukannya UU ini adalah status dan kedudukan KPPU dan aparat atau personel pegawainya dalam sistem ketatanegaraan. Ketidakjelasan kedudukan KPPU ini telah berimplikasi kepada Sekretariat KPPU sebagai pendukung kelancaran tugas KPPU.

“Dapat dipahami pada awal pembentukannya menerapkan ketentuan yang berlaku di PNS atau lembaga pemerintah lainnya pada KPPU tidak tepat. Karena KPPU diharapkan dapat bekerja dengan cepat sesuai tuntutan perkembangan sehingga *reward* atau kontra prestasi yang diterima lebih besar dari yang terjadi pada PNS,” papar Pande.

Sependapat dengan Pande, Ningrum Natasya Sirait dari Universitas



Pengamat ekonomi Pande Radja Silalahi.

Sumatera Utara kewenangan KPPU dianggap kurang mendukung tugas yang diamanatkan UU Larangan Praktek Monopoli.

Dijelaskan Ningrum, seringkali KPPU kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti yang dibutuhkan didalam proses pemeriksaan. Hal ini dikarenakan selama ini bukti-bukti didapatkan KPPU se-

bagian besar masih sangat tergantung dari bukti-bukti yang diserahkan oleh pihak pelaku usaha yang diperiksa.

“Hal ini sudah barang tentu sangat berpengaruh kepada hasil pemeriksaan yang dilakukan KPPU,” ujar Ningrum.

Oleh karena itu, kata Ningrum, diperlukan penambahan kewenangan seperti penyitaan barang bukti dan penggeledahan. Karena dalam prakteknya banyak pelaku usaha tidak kooperatif ketika diminta dokumen.

Namun demikian, katanya, KPPU harus diputuskan terlebih dahulu fungsi utamanya ketika kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan diberikan. Sebab kemungkinan konsekuensi terbesarnya kewenangan pemutus akan dipersoalkan karena luasnya kewenangan yang dimiliki. (sc),
*foto : hr/parle/naefurodjie**

Revisi UU Polri Untuk Kepentingan Bangsa dan Negara

Anggota Badan Legislasi DPR RI, Abdul Hakim menyatakan revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri) merupakan tugas mulia untuk kepentingan negara dan bangsa Indonesia.

Hal tersebut disampaikan menanggapi pendapat Imparsial yang menyatakan revisi UU Polri belum diperlukan, saat Rapat Dengar Pendapat Umum Baleg dengan Imparsial, *The Asia Foudation* dan Kontras dipimpin Anggota Baleg, Hendrawan Supratikno, di DPR RI, Jakarta, Rabu (29/1)

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Imparsial diwakili Al Araf berpendapat revisi UU Polri tidak *urgent*, sehingga tidak perlu untuk dilakukan revisi.

Menurut Abdul Hakim, revisi UU Polri bertujuan agar kinerja Polri ke depan lebih bagus, profesional, akuntable dan semakin memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menjelaskan, bahwa ada dua kata kunci pada UU Polri, yaitu terkait dengan fungsi dan lembaga kepolisian itu sendiri.

“Walaupun tadi dari Imparsial tidak sependapat untuk dilakukan revisi karena dikhawatirkan membuka luka lama dan sebagainya. Tapi ini adalah untuk kepentingan bersama



Anggota Baleg DPR Abdul Hakim.

kepentingan merah putih, negara dan kepentingan sebagai anak bangsa”, jelas politisi dari F-PKS ini.

Oleh karenanya, Abdul Hakim mengajak untuk mencermati UU Polri yang ada saat ini termasuk implikasi dari regulasi yang ada saat ini bagi persoalan-persoalan kebangsaan, kenegaraan, penegakan hukum, dan persoalan keamanan.

Jika dicermati secara obyektif dan jernih terkait dengan implikasi UU Polri yang berlaku pada saat ini bagi kepentingan bangsa, penegakan hukum, pelayanan dan fungsi-fungsi kepolisian secara umum, papar Abdul Hakim, pada akhirnya kita akan pada kesimpulan yaitu sependapat bahwa UU Kepolisian harus direvisi. Hanya persoalannya pada aspek mana harus kita revisi.

Dijelaskan Anggota Dewan dari Komisi III, jika kita masih mengkhawatirkan akan membuka luka lama dan

lain sebagainya, kita tidak akan pernah maju ketika masih dihantui oleh sebuah trauma.

Dirinya sependapat agenda reformasi harus dilanjutkan, diperkuat dan tidak boleh berhenti, serta tidak boleh dibayang-bayangi oleh sebuah ketakutan yang akhirnya tidak membuat suatu perubahan.

“Jika dicermati masukan dari Imparsial, *The Asia Foundation* dan Kontras, sebetulnya sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa UU Polri harus direvisi baik secara filosofis, yuridis, sosiologis dan secara prakteknya. Sekalipun juga memang banyak praktek-praktek kinerja kepolisian yang belum memuaskan,” tegasnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, bahwa terkait keterlibatan masyarakat dalam konteks fungsi kepolisian, dirinya mengajak untuk mencermati lebih jelas dan akurat lagi terkait dengan posisi UU Polri atau implikasinya

dengan persoalan lain.

Dia mencontohkan, pada Pasal 35 UU Polri tentang Pelanggaran Kode Etik Kepolisian diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian. Dia menilai, ini menjadi sangat tidak relevan karena peraturan tersebut dibentuk dengan Keputusan Kapolri. Sementara kita mengharapkan kinerjanya, namun Polri mengawasi sendiri dan memberikan penilaiannya sendiri.

Lain lagi terkait dengan Pasal 41, imbuh Abdul Hakim, Imparsial mengharapkan bantuan TNI diatur dalam UU. Sementara didalam UU Polri ini diatur oleh Peraturan Pemerintah. Dengan demikian mengharuskan adanya revisi.

“Inilah termasuk alasan yang kuat untuk melakukan revisi terkait UU kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebuah kemestian,” jelas Abdul Hakim. (sc), foto : eka hindra/parle/hr.



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

Menyusul terbentuknya konstitusi yang baru di Tunisia, Ketua DPR sangat mengapresiasi pencapaian tersebut. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) kini sangat dihargai di Tunisia, karena sudah masuk dalam konstitusinya.

Usai menerima Duta Besar Tunisia untuk Indonesia Morad Belhassen di ruang kerjanya, Senin (3/2), Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan, “Konstitusi baru ini menurut saya suatu revolusi yang luar biasa. Sebelumnya, parlemen Tunisia memiliki 2 kamar,

Ketua DPR Apresiasi Konstitusi Baru Tunisia

sekarang menjadi 1 kamar. Ini perubahan yang luar biasa,” puji Marzuki.

Suara rakyat begitu dihargai di Tunisia. Ini bisa terlihat dari penghargaan terhadap demokrasi dan HAM yang secara khusus diatur dalam konstitusinya yang baru. “Saya kira praktik yang akan terjadi di Tunisia tidak akan berbeda jauh dengan yang terjadi di Indonesia,” tutur Marzuki. Membentuk konstitusi baru cukup lama prosesnya. Tunisia membutuhkan 2 tahun. Dan Indonesia terutama DPR pernah memberi saran dan pemikiran untuk merumuskan konstitusi baru.

“Oleh karenanya saya mengucapkan selamat bahwa mereka telah berhasil membentuk satu UUD yang baru yang prosesnya cukup panjang dengan debat yang luar biasa selama 2 tahun. Dan juga ikut mendengarkan konsultasi dengan parlemen Indonesia. Makanya penghargaan yang luar biasa diberikan kepada parlemen kita, karena kita ikut memberikan masukan

dan saran-saran.”

Sebelumnya, Dubes Tunisia menyampaikan undangan langsung dari Presiden Tunisia kepada Ketua DPR untuk kunjungan kehormatan bertemu Presiden Tunisia. Undangan tersebut merupakan penghargaan atas sumbangsih Indonesia dalam membantu Tunisia membentuk konstitusi baru. Namun, undangan tersebut belum bisa dipenuhi Ketua DPR, karena agenda yang sangat padat.

Sementara mengomentari soal hubungan Tunisia dan Indonesia, Marzuki menilai, cukup baik. “Hubungan Indonesia dengan negar-negara Afrika itu sangat baik sejak zaman Bung Karno,” kata Marzuki. Hanya saja, hubungan tersebut kerap terkendala oleh jarak yang sangat jauh dan minimnya transportasi. Padahal, transportasi sangat penting dalam menunjang hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat. (mh)/foto:iwan armanias/parle/odjie*

Pendidikan Politik Harus Dipahami Semua Orang



Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman foto bersama siswa kelas XI SMA Negeri 5 Tasikmalaya.

Politik merupakan sesuatu yang harus dipahami oleh semua orang. Untuk memahami politik, tidak harus menjadi politikus. Namun, pemahaman politik jangan sampai salah kaprah, apalagi hanya paham politik praktis.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman saat menerima 400 siswa kelas XI SMA Negeri 5 Tasikmalaya, Jawa Barat di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kamis (6/02). Kunjungan ke-400 siswa dalam rangka *study tour* di Jakarta, dan salah satu agendanya adalah mengunjungi DPR RI.

“Politik itu sesuatu yang harus dipahami oleh siapapun. Jadi, jangan memahami politik itu secara politik praktis saja. Orang yang memahami politik tidak harus menjadi politisi. Yang penting dia memahami bagaimana pengelolaan negara ini. Ketika seseorang tidak menjadi politisi, dia tetap bisa menyampaikan aspirasinya. Tapi, agar aspirasi itu sampai kepada politisi, berarti dia harus memahami pemahaman politik,” jelas Sohibul.

Selain itu, Politisi PKS ini menyatakan pemahaman akan politik bukan hanya generasi tua, namun generasi muda saat ini harus melek politik. Apa sebab? Karena generasi muda ini nantinya akan memilih calon pemimpin, baik di daerah ataupun di pusat. Bahkan, bisa jadi generasi muda ini nantinya akan menjadi pemimpin bangsa.

“Pemahaman politik itu penting supaya warga negara itu, tidak dizhalimi oleh para politisi itu. Generasi muda ini nanti baru pertama kalinya mengikuti pilkada maupun pemilu legislatif. Mereka jangan memilih politisi itu seperti membeli kucing dalam karung. Mereka harus tahu profil maupun *track record* calonnya itu,” jelas Sohibul.

Jika sudah memilih calon pemimpin pada saat pemilu,

tambah Politisi kelahiran Tasikmalaya ini, maka pemilih memiliki hak dan kewajiban untuk mengontrol pemimpin yang sudah dipilihnya itu.

“Mereka (generasi muda) juga harus memahami hal yang konstitusional. Dan jika mereka tidak paham politik, dikawatirkan mengontrolnya secara inkonstitusional. Mereka harus paham itu. Nah, dengan pendidikan politik ini, mereka akan semakin *aware* kepada politik Indonesia,” tambah politisi Dapil Jakarta ini.

Politisi berkacamata ini menyambut positif kedatangan siswa-siswi tingkat menengah atas ini untuk berkunjung ke Kompleks Parlemen. Menurutnya, pemahaman akan politik ini akan berguna di masa mendatang bagi generasi muda.

“DPR senantiasa membuka pintu kepada masyarakat, agar lebih dekat. Kita berharap mereka sebagai generasi muda akan sangat memahami tentang negara kita. Kami sangat menyambut secara positif dan berguna untuk mereka di masa mendatang,” kata politisi yang mengaku menyukai politik sejak kecil ini.

Ditemui pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala Sekolah SMA 5 Tasikmalaya Azis Yusup Bustomi menyambut baik pemahaman politik yang telah disampaikan oleh Sohibul Iman. Diharapkan, kunjungan ini dapat memotivasi siswa-siswi dan memahami ke-DPR-an.

“Tujuan utama adalah untuk memberikan motivasi supaya anak kami ada yang mau menjadi anggota dewan atau politisi. Selain itu, semakin mengetahui tentang ke-DPR-an. Bahkan menjadi motivasi untuk menjadi anggota dewan. Mudah-mudahan anak kami ke depannya ada yang menjadi pemimpin di Indonesia,” harap Azis. (sf) foto : hr/parle/naefu-rodjie*



Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI meninjau pelabuhan Fakfak dan infrastruktur Sumber Daya Alam Ketahanan Pangan di Bomberay Papua Barat dipimpin Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena, Senin (03/02) Foto: Eka Hindra/Parle.



Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi Syamsul Bachri berdialog dengan para Guru se Sulawesi Selatan terkait dengan Ujian Nasional 2014, Kamis (29/1) Foto: Iwan Armanias/Parle.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Mahrus Munir saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direksi Bank Mandiri, Mandiri Syariah, BNI, dan BNI Syariah tentang setoran awal calon jemaah haji, Rabu (05/02) Foto: HR/Parle/andri*.